



**SUMBER BERITA**

**SABTU, 13 JULI 2019**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Dewan BS Beri 8 Rekomendasi**

**Tindaklanjuti  
Temuan BPK RI**

**KOTA MANNA, BE** - Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) yang diserahkan ke Bupati Bengkulu Selatan (BS) 20 Mei lalu di kantor BPK perwakilan Bengkulu, DPRD BS memberikan rekomendasi sebagai tindaklanjuti temuan BPK tersebut.

"Ada 8 rekomendasi dari kami kepada pihak eksekutif, agar bisa ditindaklanjuti pihak eksekutif," kata Adnan, juru bicara DPRD BS saat sidang paripurna DPRD BS dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD BS atas LHP BPK di ruang sidang utama DPRD BS, Jum'at (12/7).

Polisi PDIP BS yang juga juru bicara DPRD BS pada sidang paripurna tersebut mengatakan ke-8 rekomendasi tersebut, yakni meminta Bupati BS menindaklanjuti temuan BPK yang meliputi laporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku Terhadap tidak tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, direkomendasikan agar inspektorat dan badan pengelolaan keuangan daerah dan aset (BPKAD) BS mem-

pelajari kelemahan dari pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan melakukan pembinaan kepada semua OPD. Masih kepada inspektorat diminta agar terhadap temuan adanya kesalahan perencanaan keuangan daerah, sebagai pengawas serta satuan perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan dan memonitor temuan ini agar tidak terjadi kembali pada penganggaran tahun berikutnya. Terhadap barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan daerah BS, direkomendasikan kepada Bupati untuk melakukan pengelolaan yang disesuaikan dengan peraturan yang mengatur dan mengikat.

"Terhadap aset ini, Bupati diharapkan melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh dalam hal penataan, pemakaian serta pengelolaannya agar tepat guna dan tetap sasaran," ujarnya.

Selanjutnya rekomendasi ke-5, terhadap kelebihan bayar kepada pihak rekanan atau ke-3 berupa tuntutan ganti rugi agar segera ditindaklanjuti sesegera mungkin, jika dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima belum juga tuntas agar segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH). Lalu terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD yang terdapat catatan temuan BPK agar Bupati BS dapat melakukan evaluasi terhadap kemampuan,

kecakapan, kapasitas dan kompetensinya. Kemudian rekomendasi ke-7 diharapkan Bupati memberikan teguran pada satuan OPD pengadaan barang dan jasa yang tidak mentaati rekomendasi serta temuan BPK sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

"Terakhir, Upaya penyelesaian terkait temuan tersebut agar meminta pertimbangan hukum dari kejaksaan dan dapat menempuh jalur pengadilan," demikian Adnan.

Ketua DPRD BS, Yevri Sudioanto menambahkan, dengan adanya rekomendasi ini diharapkan agar Bupati dan OPD terkait dapat segera menindaklanjutinya. Sehingga tidak hanya sekedar dianggap angin lalu atau tidak dihiraukan.

"Kami minta apa yang kami rekomendasikan ini dapat segera ditindaklanjuti, jangan hanya sekedar didengarkan saja," imbau Yevri.

Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM memberikan apresiasi kepada DPRD BS yang telah menyampaikan rekomendasi atas temuan PBK tersebut. Dirinya mengaku, akan melakukan apa yang sudah direkomendasikan tersebut.

"Kami siap menindaklanjutinya, bahkan terkait temuan BPK kami sudah minta OPD dan pihak rekanan segera menuntaskannya paling lambat 20 Juli ini, bahkan jika tidak selesai kami siap melimpahkannya ke APH," ujar Gusnan. (369)